

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdullah, R, 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abd al-Rahman. 2017. Taj, al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami dalam Idzan Fautana, *Prinsip-prinsip Ketatanegaraan Dalam Islam, Gurubesar UIN Sunan Gunugndjati, Bandung*
- Apriani Ranny. 2018. *Prinsip Syura Sebagai Demokrasi Islam*. Skripsi. Yogyakarta: UII
- Achmad, Abdilla Fauzi. 2012. *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Poliyik*, Ctk. Pertama. Jakarta: Golden Terayon Press
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH). Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Ctk. Keempat, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, H & Putera Kemal Redindo. 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Ctk. Pertama. Jakarta: Kencana
- Handoyo, B Hestu Cipto. 2008. *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Univ.Atmajaya.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Pres
- Henry Kuncoroyekti, “Menjadikan Wakil Rakyat Semakin Bermartabat – Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Ramgka Mewujudkan Good Governance”
- H.A.W.Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT.Raja. Grafindo Persada

- Ida Zuraida, 2013, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13-14.
- Jumadi, 2014. *Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia*
- Karim, Abdul Gaffar. 2003. *Persoalan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- King Faisal Sulaiman. 2014. *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah pasca Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: , Pustaka Pelajar.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2011. *Ilmu Perundang-undangan, Cet. Ketujuh*, Yogyakarta: Kanisius
- Mas'ud Said. 2008. *Birokrasi Di Negara Birokratis* Malang: UMM Press
- Ni'matul, H. 2009. *Hukum dan Pemerintahan*, Ctk. Pertama. Bandung: Nusa Media
- Ni'matul, H. 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Palulungan, L dkk. 2017. *Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Secara Partisipatif dan Responsif Gender*. Yayasan Bakti.
- Rachmat, T. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Ctk. Pertama, Papas Sinar Sinanti, Jakarta
- Ristekdikti (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Cet. Pertama. Jakarta: Ristekdikti
- Saifudin. 2009. *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: FH UII PRESS
- Santoso Lukmam. 2013. Disertasi: *“Eksistensi Prinsip Syura Dalam Kontstitusional Islam*. Yogyakarta: UGM

Siti Zuhro, dkk. 2009. *Demokrasi Lokal (Perubahan dan Kestinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali)*. Yogyakarta: Ombak.

Suhardi, G. 2006. *Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Sunarno, S. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika

Waluyo, S. 2006. *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Faza Media

Warassi, E. 2012. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Yudoyono, Bambang. 2001. *Otonomi Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta

Yasir, A. 2010. *Makalah Hukum dan Politik*. disampaikan pada perkuliahan semester genap tahun ajaran 2009-2010 di bagian HTN FH Unila, Lampung

Yasir, A. 2008. *Hukum Perundang-undangan*. Lampung: Lembaga Penelitian Unila

Zaeni Asyhadie & Arief Rahman. 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Keempat, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Zaka Firma Aditya, dkk. 2018, *Rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan Di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sumber Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Tata Tertib DPRD Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD
7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota
10. *Peraturan daerah Indonesia*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)). Diakses pada 28 Juli 2019.

Jurnal

1. Jurnal Hukum yang dibuat oleh Yurita Zahara dengan judul Pembentukan Peraturan Daerah Dari Inisiatif DPRD Provinsi Riau Tahun 2015 (Studi Pembentukan Perda No. 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya).

Sumber Online

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/11426/11074>

Dprd.riau.go.id

Peran Serta Masyarakat Dalam Penyusunan Program Legislasi Di Daerah.
www.legalitas.org. diakses pada 30 Juli 2019.

Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD”.<https://brainly.co.id/tugas/8135110>, diakses pada 29 Juli 2019.

“Lemahnya Pengawasan Keuangan DPRD”.
<https://www.kompasiana.com/mancilan/551fa41a8133111b6e9de47a/lemahnya-pengawasan-keuangandprd>, diakses pada 30 Juli 2019

“Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenis Pengawasan”.
<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan-controlling-49>, diakses pada 30 Juli 2019.

Administrasi dan Aparatur Pemerintah”. <http://www.bappenas.go.id>, diakses pada 30 Juli 2019

Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pemerintah Daerah”.
<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/optimalisasi-fungsi-dprd-dalam-pengawasan-pemerintah-daerah-37>, diakses pada 30 Juli 2019

Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah”.
<http://www.negarahukum.com/hukum/tugas-dan-kewenangan-pemerintahan-daerah.html>, diakses pada 30 Juli 2019